

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang–Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal–usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran tersebut, desa atau yang disebut nagari berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di kabupaten, maka sebuah nagari diharuskan membuat Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LKPPN) sebagai tolak ukur keberhasilan yang dicapai oleh Pemerintah Nagari dalam satu tahun.

Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LKPPN) dimaksudkan agar kebijakan Pemerintah Nagari Ampang Pulai menjadi lebih terarah dan runtut sehingga semua yang dilakukan Pemerintah Nagari Ampang Pulai dalam akhir tahun bisa dilaporkan kepada Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari).

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LKPPN) akhir tahun merupakan penjabaran kinerja Pemerintah Nagari selama periode 1 (satu) tahun yang memuat 5 (lima) bidang yaitu bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari, bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari dan bidang penanggulangan bencana,

darurat dan mendesak nagari. Sekaligus melaporkan capaian kegiatan pembangunan selama 1 (satu) tahun, prestasi yang dicapai, dan pelaksanaan pengelolaan keuangan Nagari dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari).

1.2. Dasar Hukum

1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal–Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok–Pokok Pemerintahan Nagari;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;

16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
19. Peraturan Nagari Ampang Pulai Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag) Tahun 2015–2021;
20. Peraturan Nagari Ampang Pulai Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Tahun 2019;
21. Peraturan Nagari Ampang Pulai Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaram 2019;
22. Peraturan Nagari Ampang Pulai Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019;
23. Peraturan Nagari Ampang Pulai Nomor 1 Tahun 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019.

1.3. Tujuan Penyusunan Laporan

Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LKPPN)

Akhir Tahun mempunyai tujuan sebagai berikut:

- Agar nagari memiliki dokumen LKPPN akhir tahun yang berkekuatan hukum tetap.
- Sebagai dasar/pedoman evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan nagari pada tahun berikutnya.
- Untuk tolak ukur pencapaian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan nagari yang bisa dipertanggung jawaban kepada masyarakat setiap akhir tahun.

1.4. Gambaran Umum Nagari

a. Keadaan Fisik atau Geografis Nagari

1. Batas Wilayah

- Sebelah Utara : Nagari Setara Nanggalo
- Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
- Sebelah Barat : Nagari Carocok Anau
- Sebelah Timur : Nagari Jinang Kampung Pansur

2. Luas Wilayah

- Luas Wilayah : 489 ha
 - a) Tanah Pemukiman : 216 Ha
 - b) Tanah Sawah : 163 Ha
 - c) Tanah Perkebunan : 36,8 Ha
 - d) Tanah Perbukitan : 73,2 Ha
 - e) Tanah Perikanan : Ha
 - f) Tanah Lepas : Ha
 - g) Tanah Rawa : Ha

3. Keadaan Topografi Nagari

Secara umum keadaan topografi Nagari Ampang Pulau adalah merupakan daerah dataran ditepi pantai dan perbukitan.

b. Iklim

Iklim Nagari Ampang Pulau, sebagaimana Nagari- Nagari/ Desa di wilayah Indonesia mempunyai Iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap Nelayan dan pola tanam yang ada di Nagari Ampang Pulau Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan

c. Wilayah Administrasi Pemerintahan Nagari

Wilayah Administrasi Nagari terdiri dari 2 kampung diantaranya kampung Simpang Tambang , Kampung Kambah Batu Kalang

1. Keadaan sosial Ekonomi Penduduk

a) Jumlah Penduduk . KK dengan jumlah jiwa :

JUMLAH KK	: 1138
JUMLAH LAKI-LAKI	: 2413
JUMLAH PEREMPUAN	: 2029
JUMLAH PENDUDUK	: 4442 JIWA

b) Tingkat Kesejahteraan Masyarakat : (dalam KK/jiwa)

Kaya	Sedang	Kurang Mampu
70 KK	600 KK	468 KK

c) Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	KET
1	DIPLOMA IV SASTRA I	180	
2	AKADEMI DIPLOMA III/S MUDA	41	
3	DIPLOMA I/II	12	

4	SASTRA II	6	
5	TAMAT SD/SEDERJAT	891	
6	TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT	550	
7	TAMAT SLTP/SEDERAJAT	780	
8	TAMAT SLTA/ SEDERAJAT	1127	
9	BELUM SEKOLAH	855	

d) Mata Pencarian

Karena Nagari Ampang Pulau merupakan Nagari Nelayan dan Pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai Nelayan.

NO	PEKERJAAN	JUMLAH	KET
1	TNI	42 Orang	
2	PNS	213 Orang	
3	POLRI	64 Orang	
4	PENSIUNAN TNI/POLRI	45 Orang	
5	PENSIUNAN PNS	90 Orang	
6	NELAYAN	466 Orang	
7	RUMAH TANGGA PETANI	234 Orang	
8	RUMAH TANGGA BURUH TANI	188 Orang	
9	PEDAGANG	35 Orang	
10	TUKANG JAHIT	11 Orang	
11	PETANI / PEKEBUN	40 Orang	
12	TUKANG BATU	16 Orang	
13	TUKANG KAYU	12 Orang	
14	SOPIR dan Tukang Ojek	50 Orang	
15	TUKANG CUKUR SALON	10 Orang	
16	TIDAK BEKERJA	2926 Orang	

1	JUMLAH PENDUDUK BUTA AKSARA DAN HURUF LATIN	520
2	JUMLAH PENDUDUK CACAT FISIK DAN MENTAL	43
3	JUMLAH USIA PRIA SUBUR	800
4	JUMLAH USIA WANITA SUBUR	415
5	JUMLAH JAMKESMAS	548
6	JUMLAH ASKES	390
7	JUMLAH BPJS	620

8	UMUM	1106
---	------	------

Jumlah KK Nagari Ampang Pulau Tahun 2019

Kampung Simpang	Kampung Kambeh Batu Kalang
571	567

e) Potensi Sumber Daya Manusia

1. Jumlah
2. Usia

NO	UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1	0-5 Tahun	125	118	243	Orang
2	6-10 Tahun	78	110	188	Orang
3	11-15 Tahun	170	153	323	Orang
4	16-18 Tahun	82	75	157	Orang
5	19-23 Tahun	150	131	281	Orang
6	24-28 Tahun	96	114	210	Orang
7	29-41 Tahun	433	376	809	Orang
8	42-47 Tahun	108	102	210	Orang
9	48-55 Tahun	112	123	235	Orang
10	56 Tahun keatas	1059	727	2656	Orang

f) Pola Nelayan melaut dan Penggunaan Tanah

Para nelayan melaut secara tradisonil, namun sebagian sudah memakai peralatan Teknologi, Penggunaan Tanah di Nagari Ampang Pulau sebagian besar diperuntukan untuk Tanah seperti Pertanian Sawah dan perkebunan, sedangkan sisanya lahan kering yang digunakan seperti pemukiman, tempat wisata, tempat gudang penjualan ikan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Sedangkan Kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pupuk Masyarakat : (dalam ton/thn)

Lahan Basah (pupuk)	Lahan Kering (pupuk)
60 ton / thn	35 ton/thn

g) Pemilikan Ternak

Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Nagari Ampang Pulau berjumlah 45.000 ekor terdiri dari Kerbau sapi, kambing dan unggas.

h) Keadaan Ekonomi

Narasi tentang keadaan ekonomi Nagari Ampang Pulau Penduduk Ampang Pulau pada umumnya berusaha sebagai Nelayan Pertanian dan perkebunan, serta peternakan jasa dan perdagangan sebagai sumber mata pencaharian serari-hari, sebahagian besar masyarakat Ampang Pulau Mata pencaharian adalah Nelayan dan pertanian sawah, dan sebagai tambahan penunjang dengan tanaman kelapa, sawit dan ditambah dengan tanaman karet, coklat dan jengkol dan petai, dan ubu-ubian juga sejenis sayur-sayuran.

Sebagian penduduk berusaha tanaman palawija dan warga penduduk ada yang buka usaha di bidang peternakan, perikanan darat dan sebagian kecil usaha perdagangan, PNS, serta industri rumah tangga.

Demikianlah Narasari ringkas tentang keadaan perekonomian penduduk Ampang Pulau, yang masih memerlukan bantuan, bimbingan, pelatihan dari pihak Pemerintah maupun Dinas Instansi terkait.

i) Pembagian Wilayah Nagari

Ampang Pulau, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat merupakan 1 dari 23 Nagari di kecamatan Koto XI Tarusan yang mempunyai jarak 21 Km dari kota kabupaten. Kecamatan Koto XI Tarusan sendiri merupakan salah satu dari 15 kecamatan di kabupaten Pesisir Selatan yang termasuk kategori kecamatan miskin.

Secara geografis Nagari Ampang Pulau sendiri terletak di pesisir pantai perbatasan sebelah barat Nagari Cerocok Anau Utara Setara Naggalo dan Jinang Kampung Pansur serta nagari Pulau Karam sebelah Timur, dan sebelah Selatan Samudra Indonesia, letak topografis tanahnya dataran dan sedikit perbukitan, dengan lahan sebagian besar dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lahan pertanian sawah, perkebunan, sehingga sebagian

masyarakat Nagari adalah petani.

Nagari Ampang Pulau terdiri dari 2 Kampung, dengan potensi perangkatnya terdiri dari Seorang Wali Nagari, satu orang Sekretaris Nagari (Seknag) 2 Orang Kasi Nagari, Dua orang kaur, 2 orang Kepala Kampung dan 2 Orang Staf, mempunyai jumlah penduduk 4442 orang yang terdiri dari 2.413 orang laki-laki, 2.029 orang perempuan, dan dengan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) berjumlah 116 RTM.

Berkaitan dengan fasilitasi pembuatan dokumen RPJM Nagari Ampang Pulau merupakan kebutuhan yang mendesak terutama proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara partisipatif, demokratis dan setara. Sehingga dokumen RPJM tersebut mendapat dukungan dan legalitas dari semua unsur masyarakat.

- j) Kondisi Ekonomi
 - a. Potensi Unggulan Nagari

Nagari Ampang Pulau merupakan salah satu Nagari yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan daerah Pinggiran Pantai potensi utama Bidang Kelautan dan pertanian, yakni Perikanan tangkap, tanaman pangan, peternakan dan perkebunan. Dalam memilih potensi Nagari yang diunggulkan, Nagari Ampang Pulau juga lebih mengutamakan bidang Kelautan dan Perikanan, pertanian dan ditambah dengan bidang-bidang lain yang mempunyai potensi cukup besar seperti pariwisata, namun belum berkembang dengan optimal. Beberapa potensi yang diunggulkan Nagari adalah sebagai berikut :

1. Kelautan dan Perikanan.

Nagari Ampang Pulau memiliki alat tangkap perikanan sebagai berikut;

Bagan sebanyak 42 unit, Payang sebanyak 45 unit , pancing tonda 15 unit, jaring insang 100 unit serta pukat tepi sebanyak 14 unit. Secara keseluruhan nagari Ampang pulai memiliki potensi lestari perikanan sebagai berikut; Ikan laut demersal lebih kurang 4.300 ton/ tahun sedangkan ikan pellagis berkisar 4500 ton/ tahun. Mayoritas penduduk nagari ini memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, pedagang ikan dan pengolah hasil perikanan.

2. Pertanian.

Disektor Pertanian komoditi padi lebih dominan dari komditi lain yang di usahakan oleh masyarakat Nagari Ampang Pulai, karena beras merupakan kebutuhan pokok yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat. Khusus dalam melakukan terobosan teknologi yang berbasis sumber daya lokal digunakan teknologi padi tanam sebatang yang merupakan paket pertanian organik. Metode ini dapat menghemat biaya produksi terutama biaya pupuk, benih dan penggunaan air irigasi serta mampu memperbaiki struktur tanah dengan memperkaya bahan organik. Kendala saat ini adalah irigasi yang kurang memadai sehingga mengakibatkan produktifitas tanaman padi sangat rendah dan sering membuat petani menjadi rugi dalam mengelola pertanian padi tersebut.

3. Perkebunan.

Kegiatan perkebunan di nagari ini masih merupakan kegiatan sampingan atau sambilan, komoditi utama yang diusahakan masyarakat adalah kelapa, cengkeh, sawit dan komoditi lainnya.

a. Pemerintah Nagari

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 tahun 2016 sebagai berikut :

1. Wali Nagari : 1 Orang
2. Sekretaris Nagari : 1 Orang
3. Bendahara Nagari : 1 Orang
4. Kepala Seksi : 2 Orang
5. Kepala Urusan : 2 Orang
6. Kepala Kampung : 2 Orang
7. Staf Nagari : 2 Orang

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH

NAGARI AMPANG PULAI

KECAMATAN KOTO XI TARUSAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

- | | |
|--|------------------------|
| Wali Nagari | : EFRIDINAL |
| Sekretaris Nagari | : FEBRI PENDI CHANIAGO |
| Kepala Seksi Pemerintahan | : AFRIYANTI |
| Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan | : IRDAWATI |
| Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum | : RISKI NOVELIA |
| Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan | : EKA SYANIARTI |
| Bendahara Nagari | : DESI FEBRIDA YANTI |
| Kepala Kampung | |
| - Kampung Simpang | : JONI APRIZAL |
| - Kampung Kambeh Batu Kalang | : ZULKIFLI |
| Staf Nagari | |
| 1. Staf Nagari | : RANDI FEBRIYAN |

2. Staf BAMUS Nagari : JUL ARDI

b. Badan Permusyawaratan Nagari

Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Nagari Batu Hampa sebagai berikut :

1. Ketua : 1 Orang
2. Wakil Ketua : 1 Orang
3. Sekretaris : 1 Orang
4. Anggota : 1 Orang

**SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
NAGARI BATU HAMPAN KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Ketua : SULLYADI

Wakil Ketua : ISMET ST MANTARI BSC

Sekretaris : ADISMAN, S.Pd

Anggota : HAMDANI SAPUTRA, S.Ag

Anggota : AGUSTINA. Ama Pd

c. Lembaga Kemasyarakatan

Struktur Lembaga Kemasyarakatan yang terdapat di Nagari Batu Hampa sebagai berikut :

No	Nama Lembaga	Jumlah	Jumlah Anggota Ket. (Orang)	
----	--------------	--------	-----------------------------------	--

1	LPMN	1	35	
2	PKK	1	75	
3	Lembaga Adat (KAN)	1	48	
4	Majelis Ta'lim	1	70	
5	Dasawisma	1	5	
6	Kelompok Tani	2	80	
7	Pemuda	1	60	
8	PAUD	1	4	
9	TPQ	5	13	

VISI MISI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN CALON WALI NAGARI AMPANG PULAI PRIODE 2015-2021

A. VISI

BERSAMA MENUJU NAGARI AMPANG PULAI MAJU

Bersama mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkeadilan, aman, tertib dengan landasan adat basandi syara', syara' basandi kitabullah dan azaz gotong royong.

B. MISI

MENJADIKAN NAGARI AMPANG PULAI BERKEHIDUPAN LEBIH MAJU

- Membangun kerja sama dengan semua unsur kelembagaan nagari, ninik mamak, bundo kanduang, tokoh agama, pemuda dan pemuka masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan dan mengelola aset nagari.
- Memberikan pelayanan administrasi yang baik lagi mudah dalam urusan masyarakat.
- Menggiatkan ekonomi produktif (Nelayan, Petani, Peternak, Dan Pedagang) sebagai sumber utama ekonomi masyarakat Nagari Ampang Pulau.
- Mendorong bangkitnya ekonomi kreatif sebagai penopang usah utama masyarakat.
- Melestarikan adat, seni, budaya tradisional yang hidup dan berkembang di masyarakat.

PROGRAM

1. Bidang Pemerintahan Nagari

- Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan nagari, yaitu dengan:
 - Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien
 - Reformasi sistem kinerja aparatur pemerintahan nagari guna meningkatkan kualitas pelayanan publik
 - Optimalisasi tugas, wewenang serta fungsi struktural pemerintahan nagari
 - Pelayanan yang lebih dekat serta mudah terhadap kepentingan masyarakat
- Memberdayakan semua unsur lembaga yang terkait dengan pemerintahan nagari
- Memberdayakan semua organisasi keagamaan, sosial politik agar bisa bekerja sama dengan pemerintahan nagari
- Meninjau kembali kebijakan-kebijakan pemerintahan nagari yang tidak sesuai dan tidak sejalan dengan aspirasi masyarakat
- Meningkatkan pengelolaan aset nagari untuk anggaran pembangunan nagari
- Menyempurnakan peraturan-peraturan nagari yang ada demi kelancaran pembangunan nagari

2. Bidang Ekonomi

- Meningkatkan perekonomian masyarakat nagari dengan cara membangun sarana dan pasarana perekonomian yang meliputi:
 - Mengembangkan dan membangkitkan kembali objek wisata Pantai Batu Kalang Indah sebagai tujuan wisata bahari yang mampu meningkatkan *multi player* efek ekonomi kreatif masyarakat Nagari Ampang Pulau
 - Mendorong bangkitnya ekonomi kreatif dengan memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk membantu meningkatkan pendapatan keluarga
 - Menggiatkan nelayan tangguh, petani handal dan usahawan profesional yang mampu bersaing secara profesional dan modern
 - Mendirikan dan mengelola lembaga keuangan nagari sejenis koperasi sebagai Badan Usaha Milik Nagari untuk menyangga usaha-usaha ekonomi masyarakat

3. Bidang Sosial Dan Agama

- Menumbuhkan dan membina rasa kebersamaan antar warga agar tercipta keselarasan bermasyarakat yang baik dan bersikap gotong royong.
- Mendorong kegiatan syiar agama islam dengan menghidupkan wirid pengajian dan menyambut hari besar islam untuk meningkatkan kualitas ibadah umat

- Membina dan menggiatkan TPA/TPSA sebagai sarana pendidikan agama yang berkualitas di Nagari Ampang Pulau.

4. Bidang Olah Raga

- Mengembangkan semua kegiatan cabang olahraga yang ada di masyarakat, agar tumbuh bakat dan dapat berprestasi untuk membawa nama baik nagari maupun organisasi lewat event-event olahraga, baik tingkat lokal maupun tingkat nasional serta dapat mengurangi kesenjangan sosial di tengah-tengah masyarakat.

5. Bidang Seni Dan Budaya

- Melestarikan dan mengembangkan kesenian dan kebudayaan masyarakat yang ada, mengadakan pentas/ lomba seni budaya bangsa khususnya pada peringatan HUT kemerdekaan RI setiap tanggal 17 Agustus.
- Melestarikan kegiatan keagamaan yang dikembangkan oleh generasi muda dan Remaja Mesjid yang telah berkembang di Ampang Pulau.

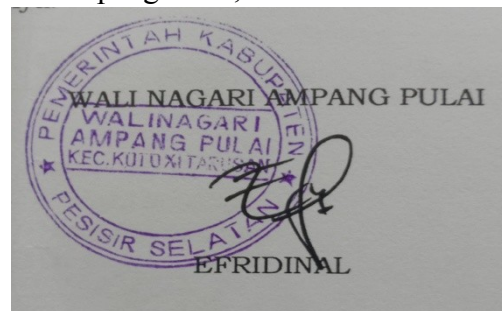
6. Bidang Prasarana

- Melaksanakan pembangunan berpedoman pada rancangan pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang nagari yang didahului oleh musyawarah mufakat dari masyarakat Nagari Ampang Pulau, serta mempertimbangkan skala prioritas sesuai kebutuhan nagari.
- Memprioritaskan pembangunan Kantor Wali Nagari sebagai lambang monumental kejayaan nagari, sekaligus jendela informasi masyarakat.
- Melaksanakan pembangunan lewat program pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh pemerintah melalui program P3MD atau sejenisnya dilaksanakan sesuai aspirasi masyarakat dengan mengedepankan musyawarah mufakat.
- Membuka jalan baru, melaksanakan pengerasan dan pengaspalan jalan yang ada di sekitar pemukiman masyarakat.

7. Bidang Kamtibmas

- Memberikan pelayanan keagamaan di tengah masyarakat dengan menjaga Kamtibmas bersama warga serta meningkatkan koordinasi dengan aparat Kepolisian dan TNI setempat.

Ampang Pulai, 30 Desember 2019



1.5. Strategi dan Kebijakan

Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari Ampang Pulai terus dilakukan setiap tahunnya dengan menggunakan anggaran/bantuan dari Pemerintah, dari evaluasi dapat diidentifikasi permasalahan yang dijadikan bahan untuk perencanaan pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan, selanjutnya disusun suatu arah pembangunan yang ditujukan untuk memecahkan permasalahan melalui intervensi pembangunan yang dituangkan ke dalam kebijakan pembangunan yang bersifat jangka panjang, menengah dan jangka pendek. Pelaksanaan pembangunan di Nagari Ampang Pulai pada tahun 2019 berpedoman kepada Strategi dan Arah Kebijakan Nagari yang tertuang dalam Peraturan Nagari Ampang Pulai Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2015–2021, yaitu sebagai berikut :

- a. Strategi Pencapaian

Program Nagari diawali dari musyawarah Nagari yang dihadiri oleh tokoh–tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala kampung, pemerintah Nagari beserta Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari dalam rangka penggalan gagasan. Dari penggalan gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di Nagari dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung. Sebagai wakil dari masyarakat Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari berperan aktif membantu pemerintah Nagari dalam menyusun program pembangunan. Pemerintah Nagari beserta Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari merumuskan program pembangunan Nagari. Sehingga dengan demikian apapun yang direncanakan dapat tercapai sesuai dengan harapan dan target yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Nagari Ampang Pulau Periode 2015–2021 strategi pembangunan Nagari yang dilaksanakan meliputi :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Nagari yang baik dan bersih
2. Meningkatkan kualitas kelembagaan pemerintahan Nagari
3. Meningkatkan sumber–sumber pendanaan pembangunan Nagari
4. Meningkatkan kualitas manajemen keuangan Nagari dan administrasi Nagari
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset/kekayaan Nagari
6. Meningkatkan kualitas pelayanan umum
7. Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat
8. Meningkatkan fungsi kelembagaan dalam masyarakat

9. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kewaspadaan terhadap bencana alam
10. Meningkatkan kualitas lingkungan.
11. Menfasilitasi dalam meningkatkan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat Nagari
12. Meningkatkan kualitas kehidupan keagamaan
13. Meningkatkan kenyamanan menjalankan ibadah
14. Meningkatkan kreatifitas dan produktifitas pemuda
15. Meningkatkan infrastruktur sosial dan ekonomi pedesaan
16. Meningkatkan budaya disiplin dalam masyarakat
17. Meningkatkan ketaatan terhadap hukum peraturan
18. Meningkatkan akses masyarakat ke sumber – sumber daya termasuk komunikasi

b. Kebijakan Nagari

1. Arah Kebijakan Pembangunan Nagari

Berdasarkan gambaran dan tata kehidupan masyarakat Nagari Ampang Pulau yang homogen dan memiliki potensi bidang Perikanan yang cukup memberikan harapan hidup bagi masyarakat, namun potensi tersebut belum dikelola secara maksimal.

Pembangunan bidang Perikanan di Nagari Ampang Pulau tidak begitu banyak memberikan hasil, Sehingga berujung pada hasil pemasaran dengan daya beli yang rendah atau ongkos angkut hasil panen yang sangat mahal.

Permasalahan lain yang dialami oleh masyarakat Nagari Ampang Pulai adalah rendahnya sumber daya manusia dan derajat kesehatan masyarakat.

Mengacu pada potensi dan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka jika dihubungkan dengan kebijakan pembangunan paling tidak ada **3 (tiga) isu strategis** yang harus di perhatikan agar kebijakan pembangunan tersebut tidak salah arah. 3 (tiga) hal penting yang dimaksud adalah :

- a. Kebijakan pembangunan harus mengarah pada pembangunan Infrastruktur dan Kerambak ikan sehingga hasil masyarakat tidak dapat menghasilkan uang.
- b. Kebijakan pembangunan harus mengarah pada pembangunan manusianya atau peningkatan kapasitas karena disana banyak masyarakat yang memiliki talenta – talenta yang tidak tersalurkan sekaligus merupakan potensi yang ada pada diri masyarakat, akan tetapi masalahnya adalah kurangnya perhatian pemerintah terhadap bakat – bakat yang ada pada masyarakat tadi, misalnya ada kemauan membuka usaha perbengkelan akan tetapi belum memiliki keterampilan yang professional sehingga membutuhkan tambahan – tambahan ilmu dan pengalaman.
- c. Kebijakan pembangunan harus mengarah meningkatkan kesejahteraan lewat bantuan dana – dana simpan pinjam perempuan atau dana usaha ekonomi produktif, karena di sana ada potensi dimana banyak masyarakat mempunyai usaha baik

dalam skala kecil maupun skala besar akan tetapi masalahnya adalah kurangnya modal usaha.

Dari uraian tersebut diatas, maka pembangunan Nagari Ampang Pulai memuat arahan – arahan yang berorientasi pada :

1. Peningkatan produktifitas sektor riil ekonomi Nagari
2. Peningkatan kelembagaan pemerintahan Nagari
3. Peningkatan peran lembaga – lembaga kemasyarakatan Nagari sebagai mitra pemerintahan Nagari
4. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana terhadap umum/kenyamanan.
5. Peningkatan infrastruktur ekonomi Nagari
6. Peningkatan peran serta masyarakat
7. Peningkatan iman, taqwa dan moral
8. Peningkatan perlindungan anak terlantar, penyandang masalah sosial, ekonomi dan sejenisnya
9. Peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat
10. Peningkatan aktivitas dan kreatifitas pemuda
11. Peningkatan keamanan dan ketertiban/ketentraman dan kewaspadaan terhadap bencana
12. Peningkatan kualitas informasi dan komunikasi
13. Peningkatan budaya/gerakan efisien, efektifitas, disiplin dan berprestasi
14. Peningkatan kualitas lingkungan
15. Peningkatan kesempatan kerja/lapangan kerja
16. Kecukupan energi dan air bersih

17. Peningkatan peran gender

18. Penguasaan informasi teknologi

Secara rinci arah kebijakan umum beberapa sektor penting adalah sebagai berikut :

1. Perikanan

Arah kebijakan umum pembangunan Perikanan adalah kecukupan pangan, komoditas, fasilitas pemberdayaan Nelayan miskin dan peningkatan pendapatan Nelayan.

2. Pendidikan

Arah kebijakan umum pembangunan pendidikan adalah peningkatan melek huruf, khususnya wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan.

3. Kesehatan

Arah kebijakan umum pembangunan kesehatan adalah penurunan angka kematian kasar (bayi dan ibu hamil), peningkatan gizi anak, peningkatan kesehatan lingkungan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat terutama keluarga miskin.

4. Perekonomian Nagari

Arah kebijakan umum perekonomian Nagari adalah peningkatan lapangan kerja, penganekaragaman usaha ekonomi dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan pemanfaatan potensi ekonomi Nagari yang berkelanjutan.

5. Lingkungan hidup

Arah kebijakan umum pengembangan lingkungan hidup adalah peningkatan kualitas dan kuantitas lingkungan hidup ditingkat Nagari.

6. Pemerintahan Nagari

Arah kebijakan umum kegiatan pemerintahan Nagari adalah penataan kelembagaan pemerintah Nagari, peningkatan kinerja aparatur pemerintah Nagari, efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Nagari serta penguatan dalam pendanaan dan peningkatan pelayanan masyarakat.

7. Sosial Budaya

Arah kebijakan umum di bidang sosial budaya adalah terbentuknya masyarakat yang inovatif, kreatif dan informatif, terbentuknya masyarakat yang tentram, tertib, disiplin, memiliki etos kerja tinggi, agamis dan bermoral, peningkatan peran wanita dalam pelaksanaan pembangunan Nagari, terbentuknya masyarakat yang bebas dari gangguan alam dan penyakit sosial serta pemeliharaan adat – istiadat dan seni budaya asli daerah.

8. Agama

Arah kebijakan umum dan kehidupan beragama adalah meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan kerukunan hidup beragama.

9. Keuangan Nagari

Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang atau barang yang dapat dijadikan milik Nagari sehubungan dengan pelayanan hak dan kewajiban Nagari.

Adapun kebijakan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan nagari yang ada di Nagari Ampang Pulau terdiri dari berapa kegiatan, antara lain :

2. Arah Kebijakan Belanja Nagari

Secara Administratif Nagari Ampang Pulau terbagi dalam 2(dua) kampung, yaitu kampung Simpang dan kampung Kambeh Batu Kalang. Pelaksana pembangunan antar wilayah barat dan wilayah timur harus seimbang agar tidak terjadi kecemburuan yang mengakibatkan ketidak harmonisan dalam masyarakat. Demi tercapainya azas ***“adil dan merata”***, pembangunan dilaksanakan bertahap dan bergantian antara wilayah Kampung Simpang dan wilayah Kampung Kambeh BATu Kalang pelaksanaan pembangunan harus melibatkan warga masing – masing wilayah agar tercipta rasa saling memiliki meskipun pembangunan tersebut berlokasi di wilayah kampung lain.

Selain azas ***“adil dan merata”***, Nagari juga lebih mengutamakan hal – hal yang bersifat darurat atau membutuhkan penanganan yang tidak bisa ditunda. Untuk mendukung semua rencana kegiatan ini tentu harus dibantu dengan kebijakan pengelolaan pendapatan Nagari, pengelolaan belanja Nagari, serta kebijaksanaan umum anggaran Nagari. Sumber pendapatan Nagari berasal dari pajak

yang dipungut oleh kolektor pajak di Nagari dibantu oleh Perangkat Nagari sesuai dengan wilayah masing – masing, kemudian dikumpulkan dan disetorkan oleh Wali Nagari ke Bank Nagari atau langsung ke Badan Pendapatan. Adakalanya petugas dari kabupaten datang sendiri untuk menagih pajak ke Nagari sekaligus untuk mengevaluasi pencapaian realisasi pajak di Nagari. Sementara itu arah kebijakan pengelolaan belanja Nagari Ampang Pulau.

Semua yang tersebut diatas diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari. Sementara kebijakan umum anggaran, pemerintah Nagari bersama Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari melaksanakan musyawarah guna membahas anggaran yang dibutuhkan 1 (satu) tahun dengan menggunakan tolak ukur pada tahun – tahun sebelumnya yang kemudian dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Nagari.

BAB II

LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI

2.1. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

Program kerja penyelenggaraan pemerintahan nagari diarahkan kepada terlaksananya tata kelola pemerintahan nagari yang baik. Selainitu program kerja penyelenggaraan pemerintahan nagari juga mengacu kepada Peraturan Nagari Ampang Pulau Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) Tahun 2015–2021 dan Peraturan Nagari Ampang

Pulai Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Tahun 2019.

Rencana Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Nagari Ampang Pulai berdasarkan RKP Nagari Tahun 2019 sebagaiberikut :

2.2. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Nagari

Dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan nagari, Pemerintah Nagari Ampang Pulai terkonsentrasi kepada pembangunan infrastruktur nagari yang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

Selain itu program kerja pelaksanaan pembangunan nagari juga mengacu pada Peraturan Nagari Ampang Pulai Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) Tahun 2015–2021 dan Peraturan Nagari Ampang Pulai Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Tahun 2019.

2.3. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Nagari

Dalam pelaksanaan program pembinaan kemasyarakatan, Pemerintah Nagari Batu Hampa terkonsentrasi kepada pembinaan yangsesuai dengan ketentuan dan indikator dan ketentuan yang berlaku.

Selain itu program kerja pembinaan kemasyarakatan jugamengacu pada Peraturan Nagari Ampang Pulai Nomor 02Tahun 2018 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) Tahun 2015–2021 dan Peraturan Nagari Ampang Pulai Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Tahun 2019.

2.4. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Nagari

Program kerja pemberdayaan masyarakat mengacu pada Peraturan Nagari Batu Hampa Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) Tahun 2015–2021 dan Peraturan Nagari Ampang Pulai Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Tahun 2019.

2.5. Program Kerja Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari

Program kerja Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari mengacu pada Peraturan Nagari Ampang Pulai Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) Tahun 2015–2021 dan Peraturan Nagari Ampang Pulai Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Tahun 2019.

2.6. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari

Dalam pengelolaan keuangan nagari, Pemerintah Nagari Ampang Pulai telah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan terbuka (*Open Government*).

Selain pengelolaan dengan sistem terbuka dan akuntabel, agar kebijakan pengelolaan keuangan nagari lebih terarah maka pemerintah Nagari Ampang Pulai telah melakukan perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tentang APB Nagari sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku.

- A.** Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019

Sebagai implementasi dari peraturan dan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Nagari, maka Pemerintah Nagari bersama Badan Permusyawaratan Nagari menetapkan ***Peraturan Nagari Ampang Pulai Nomor 02 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2019*** dan dijabarkan dengan Peraturan Wali Nagari Ampang Pulai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019.

Adapun rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari) Ampang Pulai Tahun Anggaran 2019 yaitu sebesar

B. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019

Pendapatan nagari meliputi semua penerimaan uang melalui rekening nagari yang merupakan hak nagari dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh nagari.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari disusun berdasarkan realisasi pendapatan nagari pada tahun berkenan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan nagari yang meliputi Pendapatan Asli Nagari, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain–Lain.

Adapun Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Ampang Pulai Tahun 2019 terlampir pada LKPPN ini.

2.7. Keberhasilan yang Dicapai

Selama satu tahun 2019 Pemerintah Nagari Ampang Pulai dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan nagari terbilang cukup berhasil, dengan berbagai

prestasi yang telah diarahi, adapun keberhasilan yang dicapai oleh pemerintah nagari meliputi:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Ampang Pulai telah berhasil mempertahankan tertib administrasi pada pemerintahan nagari.

- Wali Nagari menetapkan Keputusan Wali Nagari yang dibuat selama tahun 2019 sebanyak 66 dengan daftar rincian terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari LKPPN ini.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari

Dalam pelaksanaan pembangunan di Nagari Ampang Pulai tahun 2019 telah berhasil melaksanakan pembangunan yang berpihak kepada kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

2.8. Permasalahan yang Dihadapi dan Upaya yang Ditempuh

Di samping keberhasilan dan prestasi yang dicapai Pemerintah Nagari Ampang Pulai, tentu juga masih terdapat permasalahan yang dihadapi diantaranya masalah pembangunan dan SDM, baik SDM Pemerintah Nagari, Lembaga Nagari, maupun masyarakat Nagari Ampang Pulai secara umum.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaran pemerintahan nagari selama tahun 2019 antara lain:

1. Pesatnya perkembangan peraturan perundang–undangan, utamanya yang bersifat multitafsir, akan menghambat percepatan terwujudnya pelaksanaan roda pemerintahan nagari demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk meminimalisir permasalahan tersebut, Pemerintah Nagari selalu melakukan koordinasi dan konsultasi baik kepada Pemerintah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten
2. Keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) akanberpengaruh pada penerapan prinsip kehati–hatian yang berlebihanyang berdampak pada produktifitas kinerja aparatur pemerintahan nagari.Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Nagari melakukan pembinaan dan rapat–rapat koordinasi serta memberikanbekal untuk meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan danpelatihan.
3. Masalah pembangunan juga masih memerlukan penanganan serius,terutama pada kurangnya sumber dana untuk pelaksanaanpembangunan. Di mana dana yang ada masih jauh lebih kecil dari besarnya usulan warga pada Musrenbang Nagari, sehingga menimbulkan kesan bahwa usulan warga banyak yang diabaikan ataupun pembangunan dirasa kurang adil dan kurang merata antara satu tempat dengan tempat yang lain. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya yang ditempuhPemerintah Nagari adalah mencari bantuan dari PemerintahKabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk menutupikekurangan dana tersebut.

BAB V

PENUTUP

Demikian penjelasan mengenai Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LKPPN) Akhir Tahun 2019. Pada intinya, Pemerintah Nagari Ampang Pulau sudah berusaha melaksanakan kegiatan pemerintahan nagari dengan sebaik-baiknya, baik Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, maupun bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak nagari. Namun kami menyadari sepenuhnya abahwa dalam mengemban tugas melaksanakan kegiatan pemerintahan nagari masih terdapat kekurangan dan masih banyak hal-hal yang belum dituntaskan. Untuk itu secara pribadi atau atas nama Pemerintah Nagari Ampang Pulau menyampaikan permintaan maaf yang setulus-tulusnya kepada seluruh elemen mulai Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, dan masyarakat Nagari Ampang Pulau tentunya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak baik pemerintah nagari maupun lembaga nagari atas kerja samanya dan semua pihak yang telah mendukung penyelesaian LKPPN ini, dengan harapan semoga laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi oleh Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari).

Akhirnya marilah kita memohon kepada Allah SWT agar kita semua selalu mendapatkan rahmat,taufik dan hidayah-Nya sehingga pembangunan Nagari Ampang Pulau dapat berjalan lancar, aman dan damai guna meningkat kankesejahteraan masyarakat. Aamin.

Ampang Pulau, 14 Januari 2020

